

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perpustakaan Perguruan Tinggi

##### 1. Definisi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersama-sama dengan unit lain melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara menghimpun, memilih, mengolah, merawat serta melayani sumber informasi kepada lembaga induk khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya.<sup>1</sup>

Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi dapat juga terbuka untuk publik.<sup>2</sup>

Adapun definisi lain mengenai perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang terdapat di lingkungan lembaga pendidikan tinggi seperti, universitas, institut, sekolah tinggi, akademik dan lembaga perguruan tinggi lainnya. Perpustakaan perguruan tinggi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan informasi civitas akademika perguruan tinggi yang bersangkutan yaitu mahasiswa dan dosen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rismayeti, "Perpustakaan Perguruan Tinggi: Pedoman, Pengelolaan dan Standarisasi" *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 9 No. 2 (Februari 2013), h. 107.

<sup>2</sup> Standar Nasional Perpustakaan: Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 2.

<sup>3</sup> Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan* (Jakarta: Sagung Seto, 2006), h. 33.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Sulisty Basuki menyatakan pendapatnya bahwa perpustakaan perguruan tinggi ialah perpustakaan yang dikelola oleh perguruan tinggi dengan tujuan membantu tercapainya tujuan perguruan tinggi.<sup>4</sup>

## 2. Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Fungsi perpustakaan perguruan tinggi dapat ditinjau sedikitnya dari dua segi, yaitu<sup>5</sup>:

- a. Dari segi layanan, perpustakaan mempunyai enam fungsi yaitu sebagai berikut:
  1. Pengumpulan informasi;
  2. Pengolahan informasi;
  3. Penelusuran informasi;
  4. Penyebarluasan informasi;
  5. Pemanfaatan informasi;
  6. Pemeliharaan serta pelestarian informasi.
- b. Dari segi kegiatannya perpustakaan mempunyai tiga macam fungsi yaitu:
  1. Sebagai pusat layanan informasi untuk program pendidikan dan pengajaran;
  2. Sebagai pusat layanan informasi untuk program penelitian, dan

---

<sup>4</sup> Sulisty Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1993), h. 160.

<sup>5</sup> Abdurahman Saleh, *Manajemen Perpustakaan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), h. 18.

3. Sebagai pusat layanan informasi untuk program pengabdian pada masyarakat.

Adapun menurut Standar Nasional Perpustakaan, fungsi perpustakaan perguruan tinggi yaitu<sup>6</sup>:

- a. Fungsi pendidikan;
- b. Fungsi informasi;
- c. Fungsi penelitian;
- d. Fungsi rekreasi;
- e. Fungsi publikasi;
- f. Fungsi deposit;
- g. Fungsi interpretasi.

### **3. Tujuan Perpustakaan Perguruan Tinggi**

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, tujuan perpustakaan perguruan tinggi diantaranya<sup>7</sup>:

- a. Menyediakan bahan perpustakaan dan akses informasi bagi pemustaka untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Mengembangkan, mengorganisasi dan mendayagunakan koleksi;
- c. Meningkatkan literasi informasi pemustaka;
- d. Mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Melestarikan bahan perpustakaan, baik isi maupun medianya.

---

<sup>6</sup> Standar Nasional Perpustakaan: Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 8.

<sup>7</sup> Standar Nasional Perpustakaan: Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 8.

Menurut Sulistyio Basuki, tujuan penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi adalah<sup>8</sup>:

- a. Untuk memenuhi keperluan informasi masyarakat perguruan tinggi, staf pengajar dan mahasiswa, sering pula mencakup tenaga administrasi perguruan tinggi;
- b. Menyediakan bahan pustaka rujukan (referensi) pada semua tingkat akademis, artinya mulai dari mahasiswa tahun pertama hingga mahasiswa program pasca sarjana;
- c. Menyediakan ruang belajar untuk pemakai perpustakaan;
- d. Menyediakan jasa peminjaman yang tepat bagi berbagai jenis pemakai;
- e. Menyediakan jenis informasi aktif yang tidak hanya terbatas pada lingkungan perguruan tinggi tetapi juga lembaga induknya.

## **B. *Behavioral Intention* (Niat Perilaku)**

### **1. Definisi *Behavioral Intention* (Niat Perilaku)**

*Behavioral intention* atau dapat juga disebut behaviorisme didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 di Amerika Serikat. Behaviorisme (*behaviorism*) adalah aliran psikologi yang mempelajari perilaku (*behavior*) yang dapat diobservasi dan diukur. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan secara saintifik.

---

<sup>8</sup> Sulistyio Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1993), h. 52.

Behaviorisme menekankan pada respon-respon perilaku yang dapat diobservasi dan diukur.<sup>9</sup>

*Behavioral intention* (niat perilaku) didefinisikan Mowen sebagai keinginan konsumen untuk berperilaku menurut cara tertentu dalam rangka memiliki, membuang dan menggunakan produk atau jasa. Jadi konsumen dapat membentuk keinginan untuk mencari informasi, memberitahukan orang lain tentang pengalamannya dengan sebuah produk, membeli sebuah produk atau jasa tertentu, atau membuang produk dengan cara tertentu. Adapun menurut Simamora *behavioral intention* (niat perilaku) adalah suatu proporsisi yang menghubungkan diri dengan tindakan yang akan datang.<sup>10</sup>

*Behavioral intention* (niat perilaku) diartikan sebagai suatu niat. Niat adalah intensi (*intention*) adalah keinginan untuk melakukan perilaku. Niat belum berupa perilakunya.<sup>11</sup> *Behavioral intention* ialah suatu perilaku nyata yang tampak dan dapat diukur secara objektif yang dipandang melalui perbuatan dan tingkah laku manusia.<sup>12</sup>

Menurut Ahmadi, *behavioral intention* itu sendiri merupakan suatu perilaku yang menghubungkan diri dengan tindakan yang akan datang.

Yang mempelajari tingkah laku nyata yang tampak dan dapat diukur

---

<sup>9</sup>Jogiyanto H.M, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 7.

<sup>10</sup>Gaby Rodorea Agrippina. “*Behavioral Intention* Konsumen Dalam Menilai Kualitas Pelayanan Jasa Perawatan Driri (Studi Kasus Pada Konsumsi Industri Jasa Salon di Kota Bandar Lampung),” *Skripsi*, (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2016), h.9.

<sup>11</sup>Jogiyanto H.M, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 25.

<sup>12</sup>Alhamdu dan Fara Hamdana, *Psikologi Umum: Pengantar Memahami Manusia* (Palembang: NoerFikri Offset, 2017), h. 73.

secara objektif dengan pandangan yang menyatakan bahwa perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan hanya mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan, sedangkan pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan.<sup>13</sup>

## 2. Teori Perilaku Rencana (*Theory Of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Rencana (*Theory Of Planned Behavior* atau TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Tindakan Beralasan (*Theory Of Reasoned Action* atau disingkat TRA) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Icek Ajzen menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individu yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya.<sup>14</sup>

Menurut teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*), niat merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar, yang satu berhubungan dengan faktor pribadi dan yang lainnya berhubungan dengan pengaruh sosial. Penentu pertama yang berhubungan dengan faktor pribadi adalah sikap terhadap perilaku (*attitude towards the behavior*) individual. Sedangkan penentu kedua dari niat yang berhubungan dengan pengaruh sosial adalah norma subyektif (*subjective norm*).<sup>15</sup>

TRA menyatakan bahwa *behavioral intention* (niat perilaku) adalah suatu fungsi dari sikap dan norma-norma subyektif terhadap perilaku. Ini

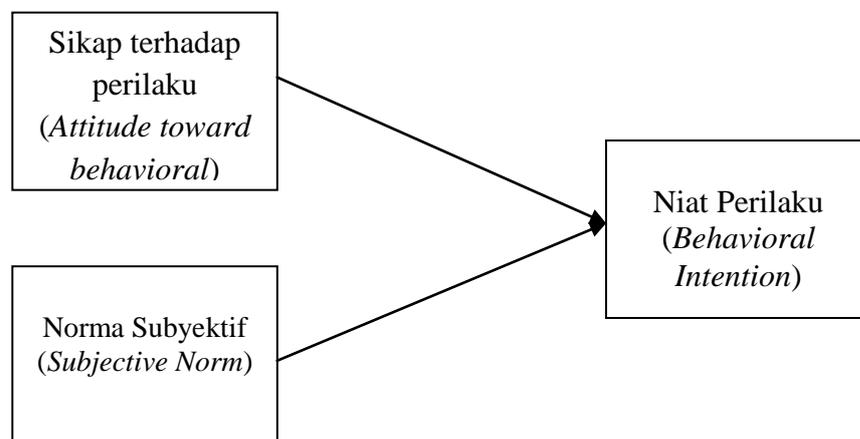
---

<sup>13</sup> Wiji Suwarno, *Psikologi Perpustakaan* (Jakarta: Sagung Seto, 2009), h. 25-26.

<sup>14</sup> Jogiyanto H.M, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 61.

<sup>15</sup> Jogiyanto H.M, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 31-32.

berarti bahwa niat seseorang untuk melakukan perilaku diprediksi oleh sikapnya terhadap perilaku (*attitude towards the behavior*) dan bagaimana dia berfikir orang lain akan menilainya jika dia melakukan perilaku tersebut (disebut norma-norma subyektif). Sikap seseorang dikombinasikan dengan norma-norma subyektif akan membentuk niat perilaku. Jika digambarkan hubungan antara sikap, norma-norma subyektif, dan niat perilaku tampak sebagai berikut:



Gambar 2.1 Niat Perilaku

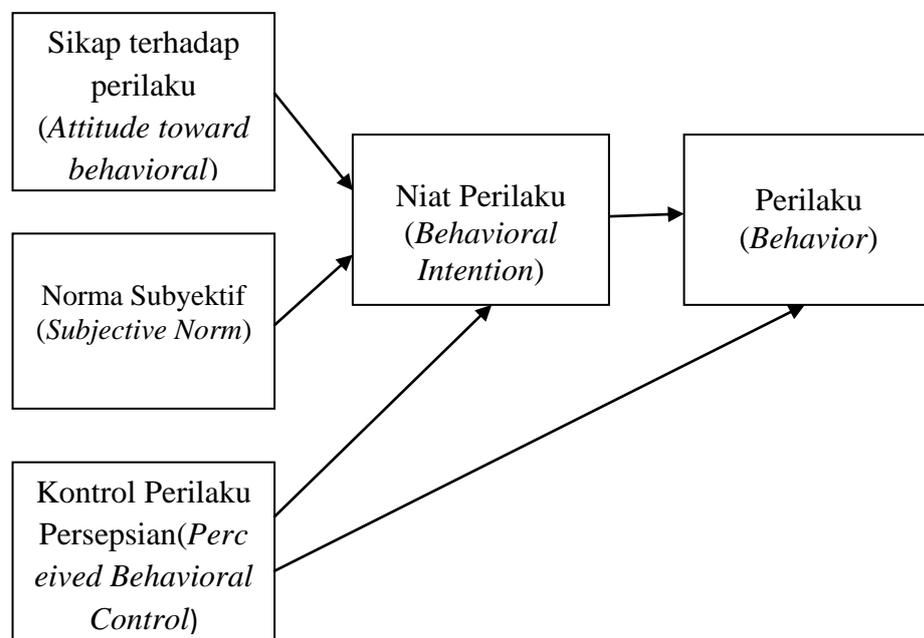
Teori ini mengasumsikan bahwa kepentingan relatif dari sikap terhadap perilaku dan norma-norma subyektif tergantung sebagian dari niat yang sedang diinvestigasi. Untuk beberapa niat, pertimbangan-pertimbangan sikap (*attitude considerations*) dianggap lebih penting dari pertimbangan-pertimbangan normatif (*normative considerations*), sedang untuk pertimbangan lainnya, pertimbangan-pertimbangan normatif (*normative considerations*) lebih mendominasi. Pertimbangan-pertimbangan sikap (*attitude considerations*) adalah pertimbangan-pertimbangan sikap terhadap perilaku dan pertimbangan-pertimbangan

normatif (*normative considerations*) adalah pertimbangan-pertimbangan norma subyektif.<sup>16</sup>

Pengembangan lebih lanjut dari teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) dijabarkan dalam teori perilaku rencana (*theory of planned behavior*) yang menyatakan bahwa perilaku dilakukan karena individu mempunyai niat atau keinginan untuk melakukannya (*behavioral intention*) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Sikap terhadap perilaku (*Attitude towards behavior*);
2. Norma-norma subyektif (*subjective norm*);
3. Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*).

Pengembangan teori tersebut menghasilkan suatu model teori perilaku perencanaan (*theory of planned behavior*)<sup>17</sup>, seperti sebagai berikut:



Gambar 2.2 Teori Perilaku Rencana (*Theory of Planned Behavior*)

<sup>16</sup> Jogiyanto H.M, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 32-33.

<sup>17</sup> Jogiyanto H.M, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI, 2008), h.62-64.

Dari gambar 2.2, teori perilaku rencana (*Theory of Planned Behavior*) dapat mempunyai dua fitur sebagai berikut:

1. Teori ini mengansumsi bahwa kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) mempunyai implikasi motivasional terhadap minat. Orang-orang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber-sumber daya yang ada atau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu mungkin tidak akan membentuk minat berperilaku yang kuat untuk melakukannya walaupun mereka mempunyai sikap yang positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain akan menyetujui seandainya mereka melakukan perilaku tersebut. Dengan demikian diharapkan terjadi hubungan antara kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) dengan minat yang tidak dimediasi oleh sikap dan norma subyektif. Di model ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) ke minat.
2. Fitur kedua adalah kemungkinan hubungan langsung antara kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) dengan perilaku. Di banyak contoh, kinerja dari suatu perilaku tergantung tidak hanya pada motivasi untuk melakukannya tetapi juga kontrol yang cukup terhadap perilaku yang dilakukan. Dengan demikian, Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung lewat minat, dan juga dapat memprediksi perilaku secara langsung. Di model hubungan langsung ini ditunjukkan dengan panah

yang menghubungkan kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) langsung ke perilaku (*behavior*).

Asumsi dasar teori perilaku perencanaan adalah banyak perilaku tidak semuanya di bawah kontrol penuh individual sehingga perlu ditambahkan konsep kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*).

Penjabaran *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku dilakukan karena individu mempunyai niat atau keinginan untuk melakukannya (*behavioral intention*) yang terdiri dari tiga komponen, diantaranya:

a. Sikap terhadap perilaku (*Attitude towards behavior*)

Sikap (*attitude*) adalah evaluasi kepercayaan (*belief*) atau perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Fishbein dan Ajzen mendefinisikan sikap (*attitude*) sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau jelek; setuju atau menolak, dan lainnya.<sup>18</sup>

b. Norma-norma subjektif (*subjective norm*)

Norma-norma subjektif (*subjective norm*) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain

---

<sup>18</sup> Jogiyanto H.M, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 36

yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.<sup>19</sup>

a. Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*)

Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku “*the perceived ease or difficulty of performing the behavior*”. Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) ini merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan-halangan yang ada. Aturan umumnya adalah, semakin menarik sikap dan norma subyektif terhadap suatu perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*), semakin kuat niat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.<sup>20</sup>

Teori perilaku perencanaan (*theory of planned behavior* atau TPB) menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga macam kepercayaan-kepercayaan. Ketiga kepercayaan-kepercayaan ini yaitu sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavior belief*), yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang terjadinya perilaku. Dalam teori ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.

---

<sup>19</sup>Jogiyanto H.M, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI, 2008), h.42

<sup>20</sup>Jogiyanto H.M, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 64-65.

<sup>21</sup>Jogiyanto H.M, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 65-66.

- b. Kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*), yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang ekspektasi-ekspektasi normatif dari orang-orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi-ekspektasi tersebut. Dalam teori ini disebut dengan norma-norma subyektif (*subjective norms*) terhadap perilaku.
- c. Kepercayaan-kepercayaan kontrol(*control beliefs*), yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangai kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut. Dalam teori ini disebut kontrol perilaku persepsian(*perceived behavioral control*).

Secara keseluruhan, kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*) memproduksi suatu sikap (*attitude*) menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku, kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*) menghasilkan tekanan sosial atau norma-norma subyektif, dan kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*) akan memberikan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Bersama-sama, sikap (*attitude*) terhadap perilaku norma-norma subyektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) akan mengakibatkan niat perilaku (*behavioral intention*) dan yang selanjutnya akan menimbulkan perilaku (*behavior*).

### C. Perilaku

Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.<sup>22</sup>

Kaum behavioris (Alwisol), mendefinisikan perilaku sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan bisa dilihat secara langsung. Aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan hanya mengamati perbuatan dan tingkah laku berdasarkan kenyataan, sedangkan pengalaman batin dikesampingkan.<sup>23</sup>

Perilaku (*behavior*) adalah tindakan-tindakan (*actions*) atau reaksi-reaksi (*reactions*) dari suatu objek atau organisme. Perilaku dapat berupa sadar (*unconscious*), terus-terang (*overt*) atau diam-diam (*covert*), sukarela (*voluntary*) atau tidak sukarela (*involuntary*).<sup>24</sup>

Perilaku yang dimunculkan individu, bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu. Faktor dari dalam diri individu inilah yang disebut sebagai kekuatan yang menjadi pendorong bagi individu untuk bertindak.<sup>25</sup>

### D. Vandalisme

Vandalisme merupakan suatu tindakan perusakan barang-barang milik umum atau orang lain baik dengan cara penambahan, penghapusan,

---

<sup>22</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 859.

<sup>23</sup> Alhamdu dan Fara Hamdana, *Psikologi Umum : Pengantar Memahami Manusia* (Palembang: NoerFikri Offset, 2017), h. 72-73.

<sup>24</sup> Jogiyanto H.M, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 11.

<sup>25</sup> Pawit M. Yusup, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 178.

pengubahan, perusakan yang secara sengaja dilakukan. Vandalisme dikatakan sebagai perusakan dan merupakan tindak kejahatan karena dilakukan dengan tanpa izin dan tidak sesuai dengan prosedur yang benar terhadap benda-benda milik orang lain atau milik umum (publik).<sup>26</sup>

Vandalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya). Perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.<sup>27</sup> Adapun menurut *Dictionary for Library and Information Science*, yang dikutip oleh Marlini dalam penelitiannya, “Vandalisme adalah kerusakan pada koleksi perpustakaan, perabotan, atau fasilitas perpustakaan yang dilakukan dengan sengaja, dan biasanya dimotivasi oleh kemarahan atau kebencian dari pelaku”.<sup>28</sup>

Sementara menurut Kharismawan dalam Endang, mengatakan bahwa vandalisme di perpustakaan merupakan suatu perusakan barang-barang milik umum atau milik orang lain dengan cara penambahan, penghapusan, dan pengubahan tulisan yang secara sengaja dilakukan. Vandalisme dikatakan sebagai perusakan dan merupakan tindakan kejahatan karena dilakukan tanpa ijin dan tidak sesuai dengan prosedur yang benar terhadap benda-benda milik orang lain atau umum

---

<sup>26</sup> Riska Pujianti. “Pemaknaan Pustakawan Terhadap Penyalahgunaan Koleksi Bahan Perpustakaan: Studi Kasus Di Perpustakaan The Japan Foundation Jakarta,” *Skripsi*, (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2011), h.9-10.

<sup>27</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 1258.

<sup>28</sup>Faramodya Barcell dan Marlini, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Vandalisme di Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan Seri A*, Vol. 2, No. 1 (September 2013), h. 28-29.

(publik) sehingga istilah vandalisme di perpustakaan merupakan salah satu bentuk kejahatan.<sup>29</sup>

Menurut Goldstein and Stanley Cohan, seperti yang dikutip oleh Sandra Hart, membagi vandalisme dalam beberapa jenis yaitu:

1. *Acquistive vandalism* (Vandalisme karena keserakahan)

Kategori pertama adalah vandalisme serakah, yang melibatkan tindakan dilakukan untuk mendapatkan properti atau uang. Contoh vandalisme serakah yang mungkin terjadi di perpustakaan mencakup kerusakan meter parkir, telepon umum, vending machine, dan mesin forokopi.

2. *Tactical vandalism* (Vandalisme taktis)

Hal ini termasuk tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan lain selain mendapatkan moneter, seperti grafiti, atau perusakan bahan oleh siswa untuk mencegah penggunaan materi oleh sesama siswa.

3. *Ideological vandalism* (Vandalisme Ideologi)

Vandalisme ideologi yang bertindak dilakukan dalam promosi penyebab, sosial, politik atau lainnya, seperti penempatan stiker dalam bahan di perpustakaan umum. Sering kali vandalisme ideologi akan didefinisikan oleh bahan baku yang ditargetkan.

---

<sup>29</sup>Guwido Nur Rahmawati. "Perilaku Vandalisme Pemustaka Di Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah," *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, 2014), h. 23.

4. *Vindictive vandalism* (Vandalisme membalas dendam)

Vandalisme membalas dendam melibatkan tindakan untuk mendapatkan balas dendam. Dalam tinjauan literturnya, Constantia Constantinou menemukan bahwa ada studi bertentangan untuk permusuhan apakah atau tidak terdapat perpustakaan adalah faktor yang signifikan dalam motivasi perusak itu.

5. *Play vandalism* (Vandalisme untuk kesenangan/permainan)

Ini mencakup tindakan penghancuran atau perusakan dalam program permainan, seperti kelompok remaja yang memutuskan untuk bermain berlatih membidik dengan jendela perpustakaan.

6. *Malicious vandalism* (Vandalisme berbahaya)

Tindakan ini mengekspresikan amarah atau frustrasi. Contoh tindakan vandalisme yang mungkin dihadapi oleh perpustakaan yaitu termasuk menyumbat toilet, menyalakan alarm kebakaran atau sistem *sprinkler*, atau buang air kecil di tempat umum.

Isaac Olugbena dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku vandalisme adalah perilaku yang sangat mengkhawatirkan karena perilaku ini jika tidak diatasi dengan baik akan berlanjut pada kerugian perpustakaan. Isaac mengemukakan beberapa macam perilaku vandalisme, yaitu<sup>30</sup>:

1. Mutilasi dan pencurian buku koleksi perpustakaan.
2. Menandai kalimat dengan pena berwarna.

---

<sup>30</sup>Guwido Nur Rahmawati. "Perilaku Vandalisme Pemustaka Di Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah," *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, 2014), h. 24.

### 3. Menulisi poin pada margin buku.

Pendapat lain yang dikemukakan Fatmawati, terdapat beberapa bentuk aksi yang termasuk ke dalam kategori vandalisme, yaitu<sup>31</sup>:

1. Coret-coret tulisan atau penodaan yang menggunakan pulpen, spidol, stabilo, maupun pensil warna;
2. Melipat halaman-halaman tertentu pada buku;
3. Penjiplakan/plagiat karya ilmiah.

Kategori vandalisme oleh Fatmawati tersebut sesuai dengan apa yang tertera di Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Dalam kedua kebijakan tersebut tertulis<sup>32</sup>:

1. Larangan untuk membawa makanan, minuman dan rokok ke dalam perpustakaan (pasal 10 Perwal).
2. Kewajiban untuk memelihara dan melestarikan koleksi perpustakaan (pasal 8 Perda).
3. Larangan untuk merusak bahan pustaka milik perpustakaan (pasal 43 Perda).

Fatmawati menerangkan tentang faktor penyebab terjadinya tindak vandalisme, yaitu<sup>33</sup>:

1. Faktor lingkungan dan stress;

---

<sup>31</sup>Riki Setia Budi. "Pengetahuan Dan Kepatuhan Pemustaka Terhadap Kebijakan Terkait Tindak Vandalisme Dan Mutilasi Koleksi Di Perpustakaan Umum Kota Magelang," *Skripsi*. (Semarang: Fakultas Ilmu Budaya 2015), h. 13.

<sup>32</sup>Riki Setia Budi. "Pengetahuan Dan Kepatuhan Pemustaka Terhadap Kebijakan Terkait Tindak Vandalisme Dan Mutilasi Koleksi Di Perpustakaan Umum Kota Magelang," *Skripsi*. (Semarang: Fakultas Ilmu Budaya 2015), h. 13-14.

<sup>33</sup>Riki Setia Budi. "Pengetahuan Dan Kepatuhan Pemustaka Terhadap Kebijakan Terkait Tindak Vandalisme Dan Mutilasi Koleksi Di Perpustakaan Umum Kota Magelang," *Skripsi*. (Semarang: Fakultas Ilmu Budaya 2015), h. 14.

2. Frustrasi, fase kebingungan (mayoritas dialami remaja);
3. Pemustaka (*user*) tidak dapat melawan/menentang petugas, sehingga pelampiasan ditujukan langsung ke koleksi;
4. Terbantur aturan dan tata tertib perpustakaan yang berlaku;
5. Pemustaka (*user*) banyak dikecewakan oleh pelayanan perpustakaan;
6. Pemustaka (*user*) tidak bisa mendapatkan informasi sesuai harapan.

Perilaku vandalisme di perpustakaan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari pemustaka sendiri maupun yang berasal dari perpustakaan. Faktor-faktor yang menyebabkan tindakan vandalisme tersebut adalah<sup>34</sup>:

1. Faktor dari pemustaka
  - a. Kurangnya kesadaran pemustaka dalam memperlakukan koleksi perpustakaan;
  - b. Kekecewaan pemustaka terhadap layanan perpustakaan;
  - c. Adanya kesempatan.
2. Faktor dari pustakawan
  - a. Lemahnya pengawasan;
  - b. Petugas yang kurang profesional.
3. Faktor lain
  - a. Faktor lingkungan;
  - b. Stres;
  - c. Tersumbatnya komunikasi.

---

<sup>34</sup>Daryono, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Vandalisme Koleksi Perpustakaan dan Upaya Pencegahannya", *Jurnal Media Pustakawan*, Vol. 17 No. 2 (Juni 2010), h. 32-33.

### E. Koleksi *Textbook*

Menurut Undang-Undang Dasar RI No. 43 Thn. 2007 tentang perpustakaan, menjelaskan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.<sup>35</sup>

Perpustakaan mengembangkan koleksinya disesuaikan dengan kegiatan tri dharma perguruan tinggi, koleksi tersebut diantaranya:<sup>36</sup>

1. Materi perpustakaan pendukung dharma perguruan tinggi;

Perpustakaan menyediakan materi perpustakaan dengan tidak memandang format maupun media guna mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta kegiatan dharma lainnya yang sesuai dengan program lembaga induknya.

2. Materi perpustakaan inti (koleksi bahan ajar);

Perpustakaan perguruan tinggi menyediakan bahan bacaan mata kuliah yang ditawarkan di perguruan tinggi. Masing-masing judul bahan bacaan tersebut disediakan 3 eksemplar untuk tiap 100 mahasiswa, di mana satu eksemplar untuk pinjaman jangka pendek (reserve) dan dua eksemplar lainnya untuk pinjaman jangka panjang (sirkulasi).

3. Terbitan pemerintah;

Perpustakaan menyediakan terbitan pemerintah daerah dan pusat.

---

<sup>35</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2007), h. 2.

<sup>36</sup>Standar Nasional Indonesia: Bidang Perpustakaan (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 3-4.

4. Terbitan perguruan tinggi;

Perpustakaan menyediakan terbitan perguruan tinggi yang bersangkutan, termasuk terbitan lembaga penelitian, karya akhir mahasiswa, karya pengajar, serta karya yang berkaitan dengan perguruan tinggi tersebut.

5. Terbitan badan internasional;

Perpustakaan menyediakan terbitan badan internasional.

6. Materi perpustakaan referensi;

Perpustakaan menyediakan bahan referensi.

Jenis dan jumlah koleksi perpustakaan perguruan tinggi adalah<sup>37</sup>:

1. Koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
2. Koleksi nonfiksi terdiri atas buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
3. Jumlah buku wajib dihitung menggunakan rumus 1 program studi X (144 sks dibagi 2 sks per mata kuliah) X 2 judul per mata kuliah = 144 judul buku wajib per program studi.
4. Judul buku pengembangan = 2 X jumlah buku wajib.
5. Koleksi AV (judul) = 2% dari total jumlah koleksi non AV.
6. Jurnal ilmiah minimal 1 judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.

---

<sup>37</sup>Standar Nasional Perpustakaan: Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 2-3.

7. Majalah ilmiah populer minimal 1 judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.
8. Muatan lokal (local content) yang terdiri dari hasil karya ilmiah civitas akademika (skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasikan di media massa, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus).

Berdasarkan Keputusan MENDIKBUD Republik Indonesia No. 0696/U/1991 bab II Pasal 11 menetapkan persyaratan minimal koleksi PPT untuk program Diploma dan S1<sup>38</sup>:

1. Memiliki 1 (satu) judul pustaka untuk setiap mata kuliah keahlian dasar (MKDK).
2. Memiliki 2 (dua) judul pustaka untuk tiap mata kuliah keahlian (MKK).
3. Melanggan sekurang-kurangnya 1 (satu) judul jurnal ilmiah untuk setiap program studi.
4. Jumlah pustaka sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi subyek pustaka.

Sedangkan untuk Program Pascasarjana :

1. Memiliki 500 judul pustaka untuk setiap program studi.
2. Melanggan sekurang-kurangnya 2 (dua) jurnal ilmiah untuk setiap program studi.

---

<sup>38</sup> Rismayeti, "Perpustakaan Perguruan Tinggi: Pedoman, Pengelolaan dan Standarisasi" *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 9 No. 2 (Februari 2013), h. 112.